Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 26852-26857

Peran Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta

Kayla Azzahra Berlandy[1], Angelica Salsabil Nabila[2], Eva Hany Fanida[3], Melda Fadiyah Hidayat[4]
[1,2,3,4]Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya
Corresponding author: Kayla Azzahra Berlandy, E-mail: 25040674354@mhs.unesa.ac.id

Published: May 2026

ABSTRAK

Transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta sering mengalami kendala pada pendanaan. Di sisi lain, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana transportasi adalah modal utama dalam perhubungan untuk segala kegiatan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber dana yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu bagian utama dari PAD. DKI Jakarta yang merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, yang menciptakan potensi besar untuk pendapatan pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis deskriptif terhadap data sekunder yang berupa laporan tentang realisasi penerimaan PKB dan PAD. Data diambil dari publikasi resmi pemerintah daerah serta lembaga terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, peningkatan pemungutan PKB dan peningkatan kepatuhan para wajib pajak menjadi hal yang sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi.

ABSTRAK

Public transportation in the DKI Jakarta Province often faces challenges related to funding. On the other hand, the Motor Vehicle Tax (PKB) makes a significant contribution to the Local Own-Source Revenue (PAD), where transportation is a primary mode of connectivity for all economic activities. Local Own-Source Revenue (PAD) is a crucial funding source for local governments in carrying out administrative and development tasks. Local taxes, including Motor Vehicle Tax (PKB), constitute a major component of PAD. As a hub of economic and governmental activity, DKI Jakarta experiences an annual increase in the number of motor vehicles, thereby creating significant potential for local tax revenue. This study aims to evaluate the role of Motor Vehicle Tax in Local Own-Source Revenue in the Special Capital Region of Jakarta. This study employs a quantitative approach with descriptive analysis of secondary data in the form of Motor Vehicle Tax collection reports and PAD revenue. Data were obtained from official publications of the local government and relevant agencies. The findings indicate that Motor Vehicle Tax makes a significant contribution to the Local Original Revenue (PAD) of the Special Capital Region of Jakarta. Therefore, improving Motor Vehicle Tax collection and increasing taxpayer compliance are crucial for strengthening local fiscal autonomy and supporting sustainable regional development.

Keyword: *Motor Vehicle Tax, Local Own-Source Resource, Contribution.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. PAD menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat memanfaatkan kekuatan ekonomi di daerah mereka untuk membiayai operasi pemerintahan dan pembangunan tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Untuk meningkatkan kemandirian keuangan mereka, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola dan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan mereka melalui desentralisasi fiskal (Mardiasmo, 2016).

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber lain yang sah adalah sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Di antara sumber-sumber ini, pajak daerah merupakan yang paling banyak berkontribusi terhadap PAD di banyak daerah di Indonesia. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk kepentingan umum (UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi atas kendaraan bermotor yang dimiliki atau digunakan. Ini adalah salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jumlah mobil yang beredar di sebuah wilayah sangat memengaruhi potensi penerimaan PKB. Tingkat kepemilikan kendaraan bermotor berkorelasi positif dengan potensi penerimaan pajak oleh pemerintah daerah di wilayah tertentu (Siahaan, 2013).

Konsep pajak untuk kendaraan bermotor bertujuan untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah melalui pengenaan biaya kepada pemilik kendaraan (V. Simanjuntak, 2018). Ada dua cara penerapan pajak kendaraan bermotor, yang pertama adalah pajak dikenakan berdasarkan kepemilikan kendaraan dan pembayaran pajak ini memberikan legitimasi administratif bagi kendaraan yang digunakan di jalan umum (Natalia, 2017). Cara kedua, pajak berkaitan dengan polusi yang dihasilkan oleh emisi kendaraan (Lambonan, 2024). Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, pajak kendaraan bermotor juga berperan sebagai alat untuk mengendalikan jumlah kendaraan di jalan, dengan tujuan mengatur lalu lintas dan mengurangi kemacetan. Pajak ini juga memastikan bahwa pemilik kendaraan turut serta dalam membiayai pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat emisi dari kendaraan (P. G. Simanjuntak dan Dompak, 2024).

Sebagai ibu kota negara, Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya aktivitas ekonomi, perdagangan, dan jasa, serta jumlah penduduk yang berasal dari berbagai daerah. Kondisi ini menyebabkan jumlah kendaraan bermotor di wilayah DKI Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan ini memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor. Dalam struktur penerimaan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta, pajak kendaraan bermotor termasuk salah satu sumber yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa industri kendaraan bermotor memainkan peran strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penerimaan yang ada, pengelolaan dan optimalisasi pemungutan PKB sangat penting.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor meningkatkan PAD di beberapa provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Muis dan Adhitama (2021) menemukan bahwa PKB adalah salah satu komponen pajak daerah yang paling banyak berkontribusi terhadap PAD. Selain itu, penelitian oleh Ermawati dan Rosyada (2023) menemukan bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat dan memainkan peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Meskipun demikian, untuk menentukan sejauh mana peran pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masih ada beberapa kendala yang menghalangi optimalisasi penerimaan pajak, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah, tunggakan pajak kendaraan bermotor, dan pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak selalu sebanding.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta, seperti yang diuraikan di atas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peran PKB dalam struktur PAD dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

KAJIAN TEORI

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Menurut Warsito (dikutip oleh Utami, 2014) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sedangkan menurut Herlina Rahman (dikutip oleh Utami, 2014) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Dapat dikatakan pula bahwa Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya keterkaitan dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Pajak Daerah

Jika membahas tentang pajak daerah erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah dimana pajak dan retribusi daerah memang merupakan sumber PAD yang memberikan kontribusi paling besar dalam proses pembangunan dan pembiayaan rumah tangga suatu daerah. Pengertian pajak daerah menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Secara administratif pajak daerah digolongkan menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak Kota/Kabupaten.

Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Teori Artibusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya (Fikriningrum, 2012). Teori ini relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perliaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan baik dan factor eksternal misalnya sanksi pajak. Sedangkan dari faktor internal, adanya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan perpajakannya.

Teori Asuransi

Dalam Teori Asuransi (Mardiasmo, 2008) masyarakat wajib membayar pajak yang dianggap sebagai premi asuransi dikarena negara menjamin bahwa jiwa, properti, dan hak-hak mereka dilindungi. Menurut (Mardiasmo, 2002) mengatakan bahwa pajak terdiri dari beberapa jenis, yang pertama berdasarkan jenisnya:

a. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
   Pajak langsung yaitu pajak yang wajib dibayar sendiri oleh pihak yang bertanggung jawab atas pajak dan tidak dapat dibebankan dan diberikan ke pihak lain seperti PPh.
b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat diberikan atau dibayarkan kepada orang lain, seperti PPN.

Pajak subjektif dan objektif adalah dua kategori pajak yang berbeda berdasarkan sifatnya. Pajak subjektif bergantung pada subjeknya dan mempertimbangkan keadaan diri yang dikenakan pajak, seperti PPh. Pajak objektif berpangkal pada objeknya tanpa mempertimbangkan kondisi diri wajib pajak, seperti PPN dan pajak yang terkait dengan penjualan barang mewah.

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Carolina (2009) pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak yang digunakan untuk bertidak, mengatur strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibanya sebagai wajib pajak sehubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Berdasarkan penelitian terdahulu Ilhamsyah dkk., (2016) dan Ihsan (2013) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari data sekunder yang diperoleh berdasarkan data Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2024. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data melalui membaca literatur, jurnal-jurnal, maupun sumber lain yang terkait baik yang bersumber dari perpustakaan maupun instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data tersebut dianalisis untuk memahami peran pajak dalam meningkatkan PAD di DKI Jakarta.

PEMBAHASAN

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling signifikan dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya di DKI Jakarta. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Jakarta berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, yang ditandai dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya, yang pada gilirannya secara langsung meningkatkan potensi penerimaan pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengukur otonomi fiskal suatu daerah dalam konteks otonomi daerah. Semakin tinggi PAD yang terkumpul, semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pajak daerah merupakan penyumbang utama PAD, dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak yang paling stabil dan menjanjikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan dan administrasi pemerintah daerah.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi DKI Jakarta masih menunjukkan peran yang sangat signifikan. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan PKB mencapai sekitar Rp9,6 triliun dan menjadi salah satu penyumbang terbesar kedua dalam struktur pajak daerah setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta tahun 2024 mencapai Rp44,46 triliun atau sekitar 98,85% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah, termasuk PKB, telah berjalan secara efektif bahkan melampaui target yang direncanakan.

Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PAD, PKB secara konsisten menyumbang sekitar 20% hingga 30% dari total PAD dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, pada periode 2020–2022, kontribusi rata-rata PKB terhadap PAD berada pada kisaran 20,81%, yang menunjukkan bahwa PKB merupakan salah satu sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan bagi pemerintah daerah. Tingginya kontribusi PKB ini tidak terlepas dari kondisi DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mencapai sekitar 4,90% pada tahun 2024 juga turut mendorong peningkatan aktivitas masyarakat dan kepemilikan kendaraan bermotor, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jakarta cukup signifikan. Menurut penelitian Hadi (2018), kontribusi PKB terhadap PAD berkisar antara 15% hingga 19% setiap tahun. Persentase ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor menyumbang hampir seperlima dari total PAD, yang berarti bahwa PKB merupakan salah satu pilar pendapatan provinsi. Temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian baru-baru ini. Ermawati dan Rosyada (2023) menemukan bahwa penerimaan PKB di DKI Jakarta sangat

efektif, bahkan mencapai lebih dari target. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik. Sebaliknya, Nurhayati dkk. (2023) menunjukkan melalui analisis statistik bahwa PKB memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Dengan kata lain, peningkatan penerimaan PKB akan secara langsung diikuti oleh peningkatan PAD.

Namun, potensi yang besar ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak tetap menjadi salah satu masalah utama yang saat ini dihadapi pemerintah. Banyak orang masih menunda pembayaran pajak kendaraan mereka atau bahkan tidak membayarnya tepat waktu. Hal ini mengakibatkan tunggakan pajak yang signifikan, yang mengurangi potensi penerimaan pajak yang seharusnya maksimal. Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak sangat penting dalam hal ini. Tingkat kepatuhan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan kewajiban perpajakan mereka.

Faktanya, pemerintah daerah telah melakukan upaya signifikan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Penerapan sistem pembayaran pajak digital merupakan salah satu inisiatif yang sangat berhasil. Berkat layanan online, warga dapat membayar pajak kendaraan mereka dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke kantor. Selain itu, untuk mendorong warga membayar pajak yang menunggak, program pengampunan pajak atau pembebasan denda sering kali ditawarkan.

Selain itu, keberhasilan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipengaruhi oleh sistem manajemen administrasi dan pemungutan pajak. Inisiatif pemerintah daerah seperti digitalisasi layanan pembayaran pajak, program pembebasan denda, dan peningkatan layanan publik telah terbukti efektif dalam mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dapat berdampak langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas sistem pemungutan pajak dapat diukur dengan menilai sejauh mana penerimaan aktual mencapai target. Jika penerimaan aktual mendekati atau bahkan melampaui target, berarti sistem tersebut berfungsi secara efektif. Tingkat efektivitas yang tinggi di DKI Jakarta menunjukkan bahwa pengelolaan PKB sudah cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan.

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cenderung meningkat setiap tahun, sebagaimana terlihat dari tren pertumbuhannya. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah mobil di wilayah metropolitan Jakarta. Sebuah studi oleh Permana dan Sampurna (2025) menemukan bahwa faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan PKB adalah kenaikan jumlah kendaraan yang dimiliki masyarakat. Semakin banyak kendaraan yang dimiliki masyarakat, semakin besar potensi pendapatan pajak yang dapat dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa transportasi dan pendapatan pemerintah daerah saling terkait erat.

Selain berfungsi sebagai sumber pendapatan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki tujuan lain yang sangat penting yaitu dengan membantu mengendalikan jumlah kendaraan di jalan raya. Pajak kendaraan membantu pemerintah mengurangi kemacetan lalu lintas dan dampak lingkungan. Pajak ini juga membantu mengurangi polusi udara serta kerusakan infrastruktur jalan yang disebabkan oleh jumlah kendaraan yang berlebihan. Oleh karena itu, PKB memiliki dua fungsi yaitu mendukung kebijakan publik dan berfungsi sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah DKI Jakarta sangat dipengaruhi oleh pajak kendaraan bermotor. Meningkatnya jumlah kendaraan, kemudahan dalam pemungutan pajak, serta kebijakan pemerintah yang mendukung optimalisasi pendapatan merupakan faktor-faktor yang mendorong kontribusi yang tinggi. Ke depannya, pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui peningkatan kesadaran masyarakat, perbaikan sistem pelayanan, serta penguatan kebijakan perpajakan. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan kontribusi PKB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus meningkat dan mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. Pada akhirnya, pengelolaan PKB yang efektif akan memperkuat otonomi fiskal daerah serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta. PKB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang stabil dan memberikan kontribusi signifikan terhadap total PAD setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh tingginya jumlah kendaraan bermotor di DKI

Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Efektivitas pemungutan PKB di DKI Jakarta mampu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pajak daerah, khususnya PKB, telah berjalan cukup optimal.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi penerimaan PKB, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta memperbaiki sistem pelayanan pajak agar kontribusi PKB terhadap PAD dapat terus meningkat dan mendukung kemandirian fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ermawati, D. D., & Rosyada, F. Y. (2023). Analisis efektivitas penerimaan dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.

Ermawati, E., & Rosyada, R. (2023). Analisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Ilmiah Manajemen (JUKIM)*.

Hadi, S. (2018). Analisa kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Moneter*.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Yogyakarta: Andi.

Muis, M. A., & Adhitama, S. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*.

Nurhayati, N., dkk. (2023). Pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.

Permana, R., & Sampurna, D. (2025). Analisis laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Siahaan, M. P. (2013). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Havi, A. P., Gurendrawati, E., & Prihatni, R. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik dan Akuntansi*.

Joshua, S., Ferdiansyah, A. B., & Sulistiana. (2024). Analisis sektor basis terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*.

Hasisah, Handarini, D., & Musyaffi, A. M. (2024). Kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah DKI Jakarta periode 2020–2023. *ISC BEAM: International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management*.